



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN KEGIATAN KOMISI V DPR RI
MASA PERSIDANGAN III TAHUN SIDANG 2023-2024
(16 JANUARI SAMPAI DENGAN 4 MARET 2024)**

I. PENDAHULUAN

Sesuai dengan keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 8 November 2024 alokasi Waktu Rapat dalam Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 yang dilaksanakan mulai tanggal 16 Januari sampai dengan 6 Februari 2024, berjumlah 16 (enam belas) hari kerja atau 22 (dua puluh dua) hari kalender. Sedangkan Masa Reses dimulai tanggal 7 Februari sampai dengan 4 Maret 2024, berjumlah 19 (sembilan belas) hari kerja atau 27 (dua puluh tujuh) hari kalender.

Menjelang masa PEMILU kegiatan Komisi V DPR RI pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 untuk rapat-rapat Komisi hanya dilakukan tiga kali kegiatan dan kunjungan kerja spesifik ditiadakan sedangkan kunjungan kerja reses Masa Persidangan III tahun Sidang 2023-2024 akan dilaksanakan setelah PEMILU pada akhir Masa Reses.

Adapun hal-hal menonjol yang menjadi perhatian Komisi V DPR RI di antaranya adalah sebagai berikut:

FUNGSI LEGISLASI

Pada masa sidang ini Komisi V melakukan Rapat dengan BKD DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut, dan Ketua Tim Pokja Penyusunan RUU Pelayaran Indonesian National Shipowner's Association (INSA) untuk mendengarkan penjelasan terkait progress kajian atas Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.

FUNGSI PENGAWASAN

Dalam fungsi Pengawasan Komisi V DPR RI telah melakukan Rapat Kerja dan Rapat Dengar Pendapat dengan Mitra Kerja Komisi V DPR RI, RDPU dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (GEMA ABAH) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk perubahan (GAMPAR) serta melakukan Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN :

Rapat intern Komisi V DPR RI, Selasa, 16 Januari 2024 membahas Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan III Tahun 2023 – 2024 mulai tanggal 16 Januari sampai dengan 4 Maret 2024.

BIDANG LEGISLASI DAN PENGAWASAN

RAPAT KERJA

Rapat Kerja dan RDP dengan Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Kepala BMKG, Kepala BNPP/Basarnas, Kakorlantas Polri dan *Stakeholders* Terkait, Rabu, 22 November 2023, agenda Membahas evaluasi terhadap pelaksanaan Angkutan Libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024, memutuskan :

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, BMKG, BNPP/Basarnas, Korlantas Polri, beserta seluruh operator transportasi nasional dan operator Jalan Tol atas penyelenggaraan angkutan libur Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 yang aman, lancar, dan terkendali.
2. Komisi V DPR RI meminta Kementerian Perhubungan bersama seluruh operator transportasi nasional agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang, antara lain:
 - a. melakukan evaluasi dan meningkatkan langkah preventif dalam mengantisipasi terjadinya kecelakaan;
 - b. meningkatkan pengawasan dan inspeksi rutin dalam pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap moda transportasi;
 - c. menambah titik pemasangan sarana prasarana keamanan dan keselamatan serta kenyamanan lalu lintas;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap melonjaknya harga tiket pesawat di beberapa rute penerbangan.
 - e. menyampaikan hasil investigasi kecelakaan Kereta Api kepada Komisi V DPR RI
3. Komisi V DPR RI meminta Kementerian PUPR bersama seluruh operator Jalan Tol agar melakukan peningkatan untuk mendukung penyelenggaraan angkutan mudik yang akan datang, antara lain:
 - a. memastikan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Jalan Tol sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. membangun dan memperluas Tempat Istirahat dan Pelayanan (TIP) untuk menambah kapasitas parkir kendaraan secara proposional;
 - c. mempercepat penyelesaian pembangunan jalan tol di berbagai daerah.
4. Komisi V DPR RI meminta BMKG meningkatkan koordinasi lintas sektor terkait diseminasi informasi untuk antisipasi cuaca ekstrim dan memastikan informasi sampai kepada stakeholder dan masyarakat.
5. Komisi V DPR RI meminta BNPP/Basarnas untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam penanganan kecelakaan dengan menambah personil dan meningkatkan pelatihan SDM potensi SAR.

6. Komisi V DPR RI meminta Korlantas Polri untuk melakukan evaluasi dan kajian skema rekayasa lalu lintas, utamanya penguraian kemacetan pada titik-titik krusial dan lokasi wisata sebagai upaya perbaikan pada penyelenggaraan angkutan mudik berikutnya.

RAPAT DENGAR PENDAPAT

Rapat Dengar Pendapat dengan BKD DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut, dan Ketua Tim Pokja Penyusunan RUU Pelayaran Indonesian National Shipowner's Association (INSA) untuk mendengarkan penjelasan terkait progress kajian atas Undang-Undang No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran, dengan kesimpulan rapat :

1. Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kepala BKD DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan DPP Indonesia National Shipowner Association atas pokok-pokok pikiran terkait masukan dalam Penyusunan Perubahan UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
2. Komisi V DPR RI memahami masukan dari Kepala BKD DPR RI, Dirjen Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan, dan DPP Indonesia National Shipowner Association sebagai rangkaian dari proses penyusunan Rancangan Naskah akademik dan Draft Rancangan Undang-undang UU No 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran

RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM/AUDIENSI

Rapat Dengar Pendapat Umum dengan Gerakan Masyarakat Arus Bawah (GEMA ABAH) dan Gerakan Masyarakat Parung Panjang untuk perubahan (GAMPAR), Senin, 22 Januari 2024, dengan agenda permohonan audiensi, diterima oleh Anggota Komisi V DPR RI DR. Drs. Mulyadi, M.M. A.

2. Pada Masa Persidangan III Tahun Sidang 2023-2024 Komisi V DPR RI melakukan Kunjungan Kerja Reses dilaksanakan tanggal 29 Februari sampai dengan 4 Maret 2024 ke:
 - Provinsi Sumatera Selatan
 - Provinsi D I Yogyakarta
 - Provinsi Bali

Jakarta, Februari 2024
Kabagset komisi V DPR RI,

Nunik Prihatin Budiastuti, SH.
NIP. 19691202 199803 2 002